

DAFTAR PUSTAKA

- AICPA. (1982). *Confiscation of Statement on Auditing Standards*. Retrieved from Scribd: <http://www.scribd.com/doc/164174182/Sistem-Pengendalian-Internal#scribd>.
- Danke, Y. (2012). Analisis Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pada Siklus Penggajian Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada Perusahaan Plastik Injection) . *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi – Vol 1, No. 1*, Halaman 20-26.
- Fibriyanti, Y. V. (2017). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Populer Sarana Medika, Surabaya). *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI) Universitas Islam Lamongan, Volume II No. 1*, Halaman 371-384.
- Kaelani, N. (2019). *Sistem Informasi Akuntansi Manual dan Berbasis Komputer. Edisi ke-1*. Jakarta: Pundi Redana.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurbaity, S. (2010). *Pengembangan sistem Informasi kepegawaian (simpeg) berbasis web : studi kasus Subag Administrasi Kepegawaian Pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah.
- Romney dan Steinbart. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi. Edisi ke-14*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tawaqal, Irzan dan Suparno. (2017). PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No. 4, (2017)*, Halaman 125-135.
- Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Sistem Pengendalian Internal. Indonesia: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Indonesia: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara.